ANDA BINGUNG MENGHADAPI PERKARA DI PENGADILAN,
KARENA TAK ADA BIAYA ?

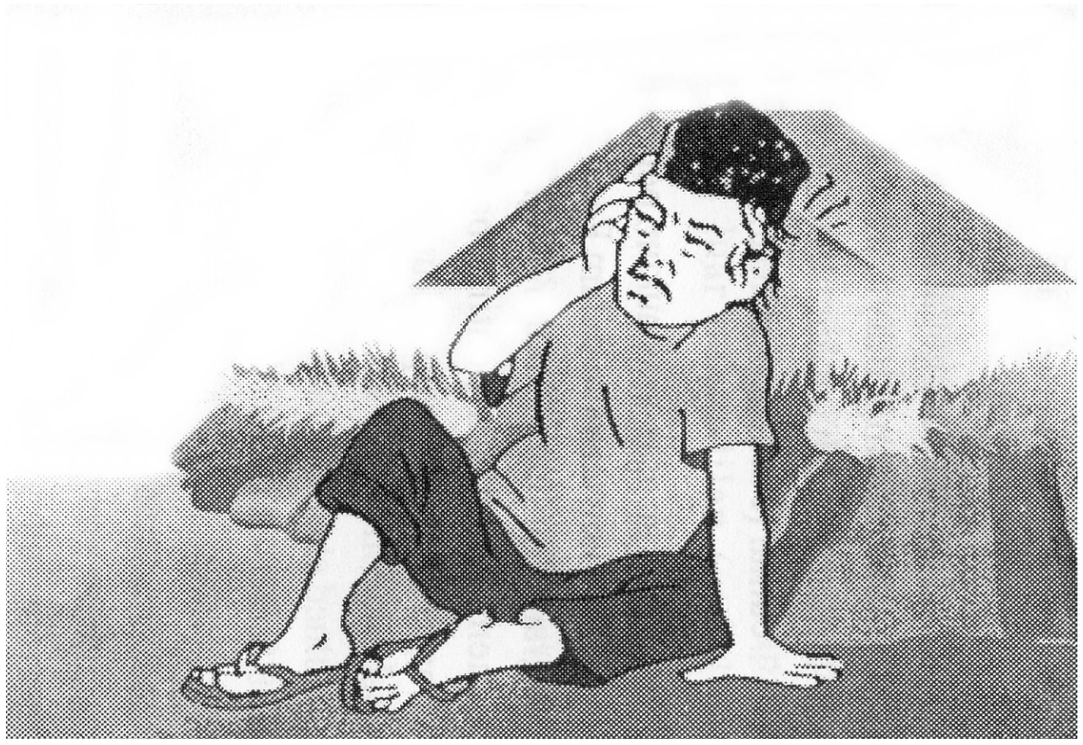

JANGAN BINGUNG !
MINTA INFORMASI KE :

- **Pengadilan Negeri / Tinggi;**
- **Kejaksaan Negeri / Tinggi;**
- **Lembaga Bantuan Hukum**

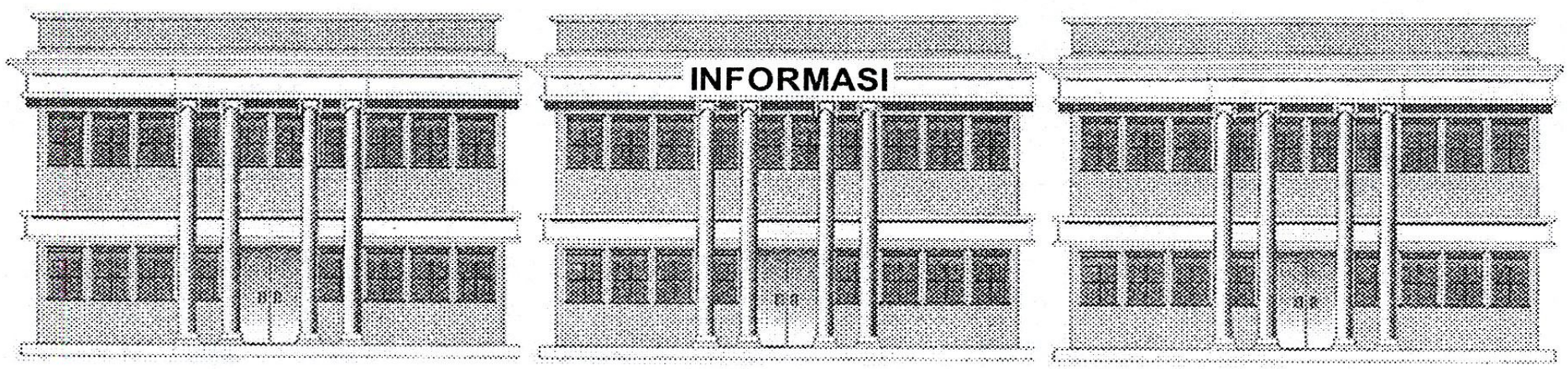

MAHKAMAH AGUNG RI MELALUI DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM, MENYEDIAKAN DANA BANTUAN HUKUM LEWAT :

1. **PENGADILAN NEGERI**
2. **LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

PROSEDUR MEMPEROLEH DANA BANTUAN HUKUM

MELALUI PENGADILAN NEGERI

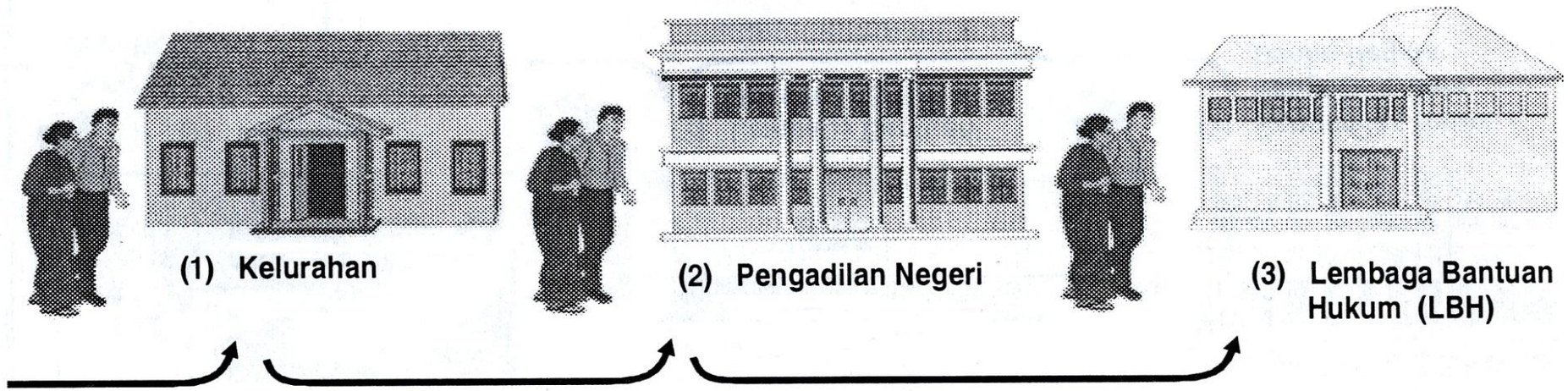

Keterangan :

1. Datang ke Kelurahan / Desa meminta Surat Keterangan tidak Mampu, atau
2. Membuat Surat Pernyataan Tidak Mampu yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, atau
3. LBH / Advokad ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pembelaan.

PROSEDUR MEMPEROLEH DANA BANTUAN HUKUM
MELALUI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)

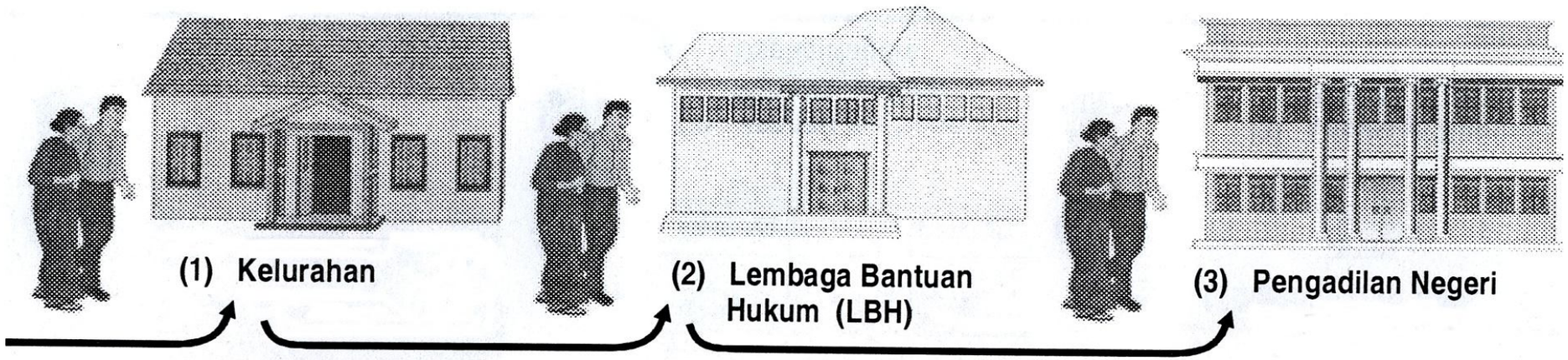

Keterangan :

1. Datang ke Kelurahan / Desa meminta Surat Keterangan Tidak Mampu; atau
2. Membuat Surat Pernyataan Tidak Mampu yang disahkan Pengadilan Negeri
3. Pengadilan Negeri memeriksa perkara yang diajukan oleh LBH.

PROSEDUR PERMINTAAN DANA BANTUAN HUKUM
OLEH PENGADILAN NEGERI (PN)

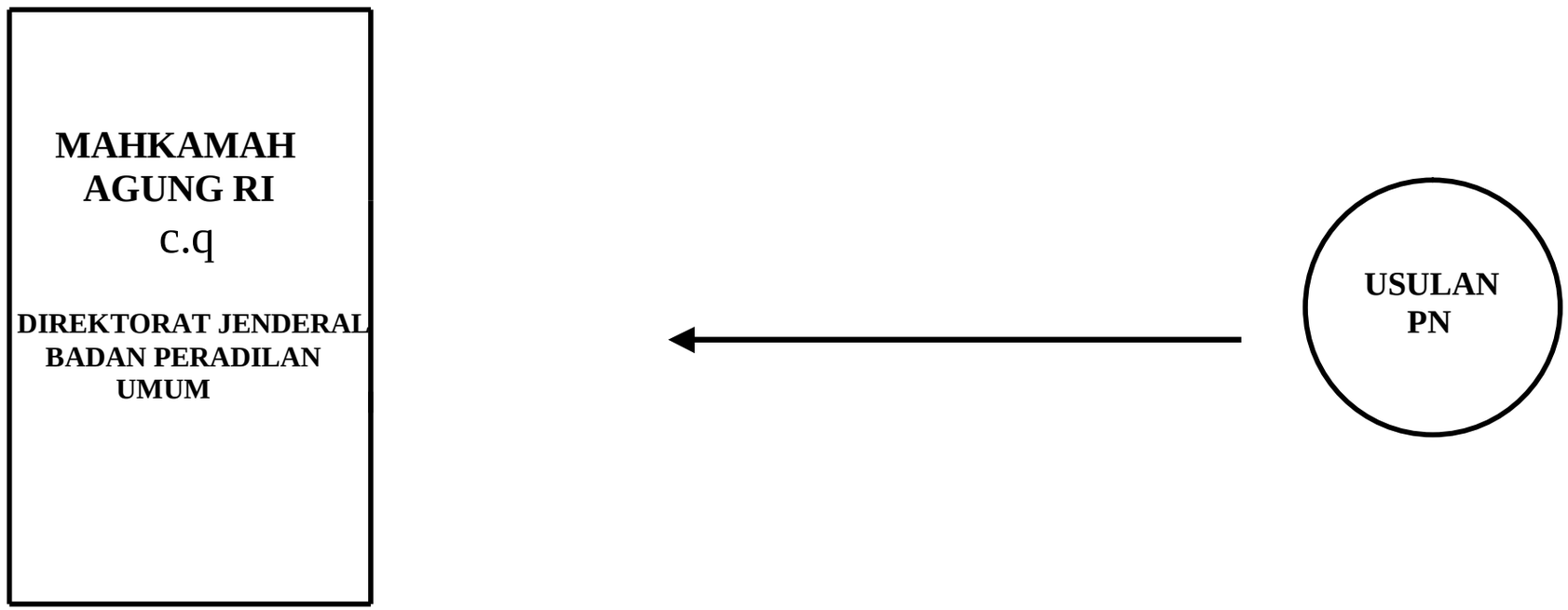

PROSEDUR PEMBERIAN DANA BANTUAN HUKUM KEPADA PENGADILAN NEGERI (PN)

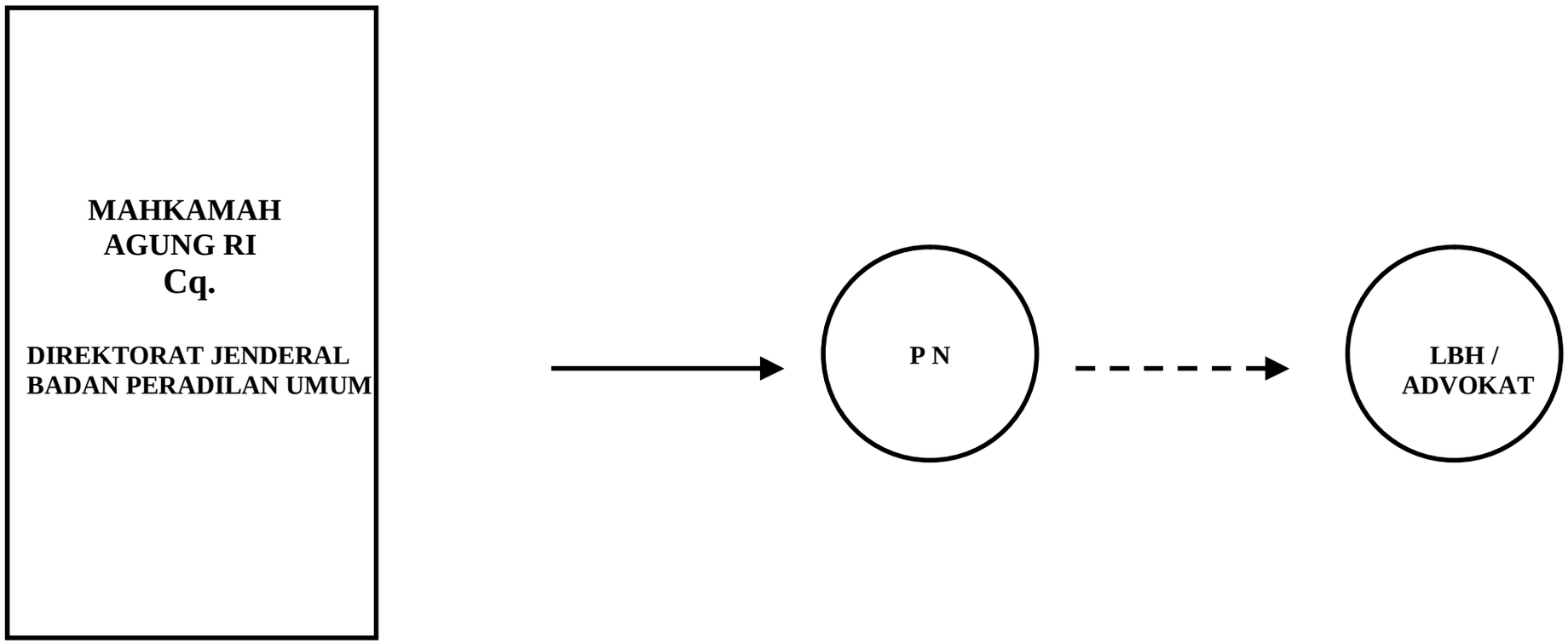

: Pemberian dana berdasarkan usulan PN

: Pemberian dana berdasarkan perkara yang ditangani oleh LBH / Advokat

PROSEDUR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI (PN)

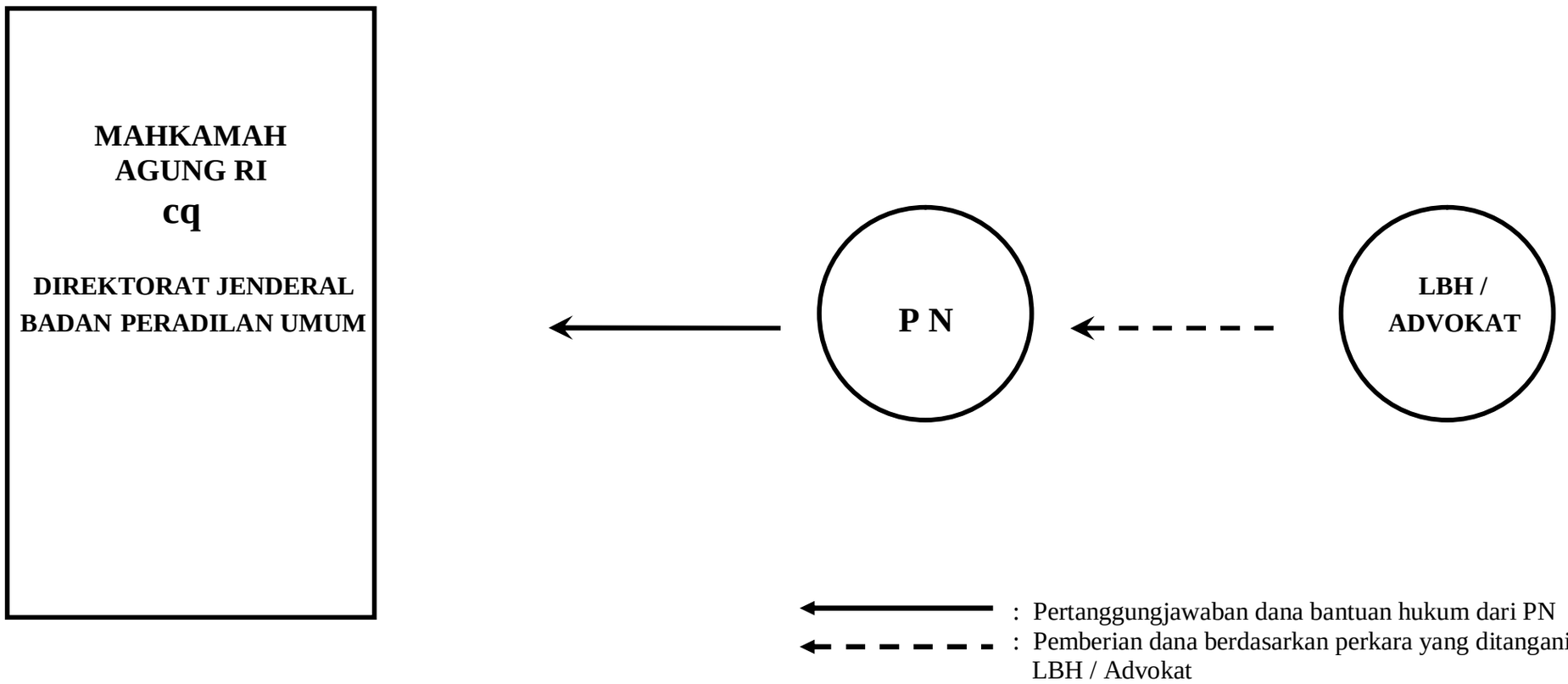

PROSEDUR PERMINTAAN DANA BANTUAN HUKUM
OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)

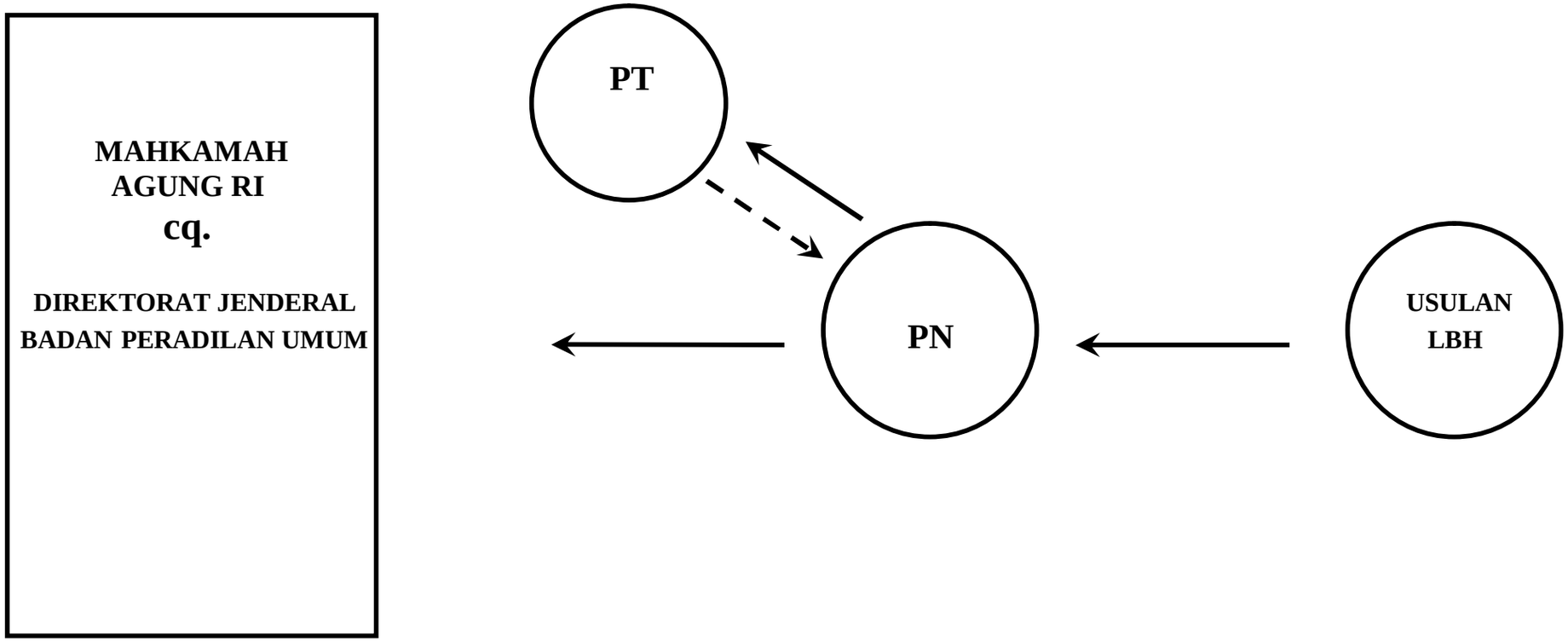

: Permintaan dana bantuan hukum berdasarkan usulan LBH

: Pertimbangan Pengadilan Tinggi, sebelum usulan LBH disetujui

PROSEDUR PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
ANTARA LBH DENGAN PN SEBELUM PEMBERIAN DANA BANTUAN HUKUM

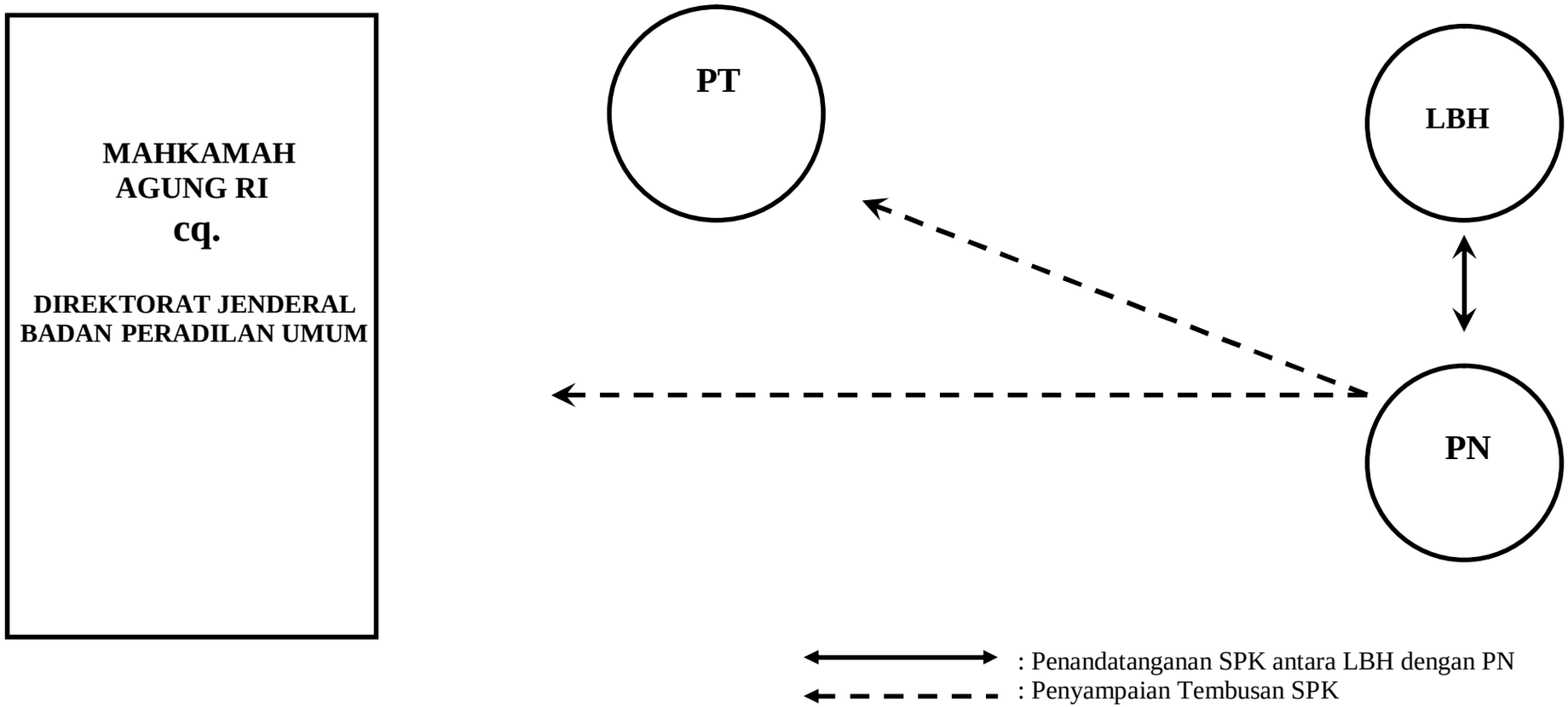

PROSEDUR PEMBERIAN DANA BANTUAN HUKUM
KEPADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)

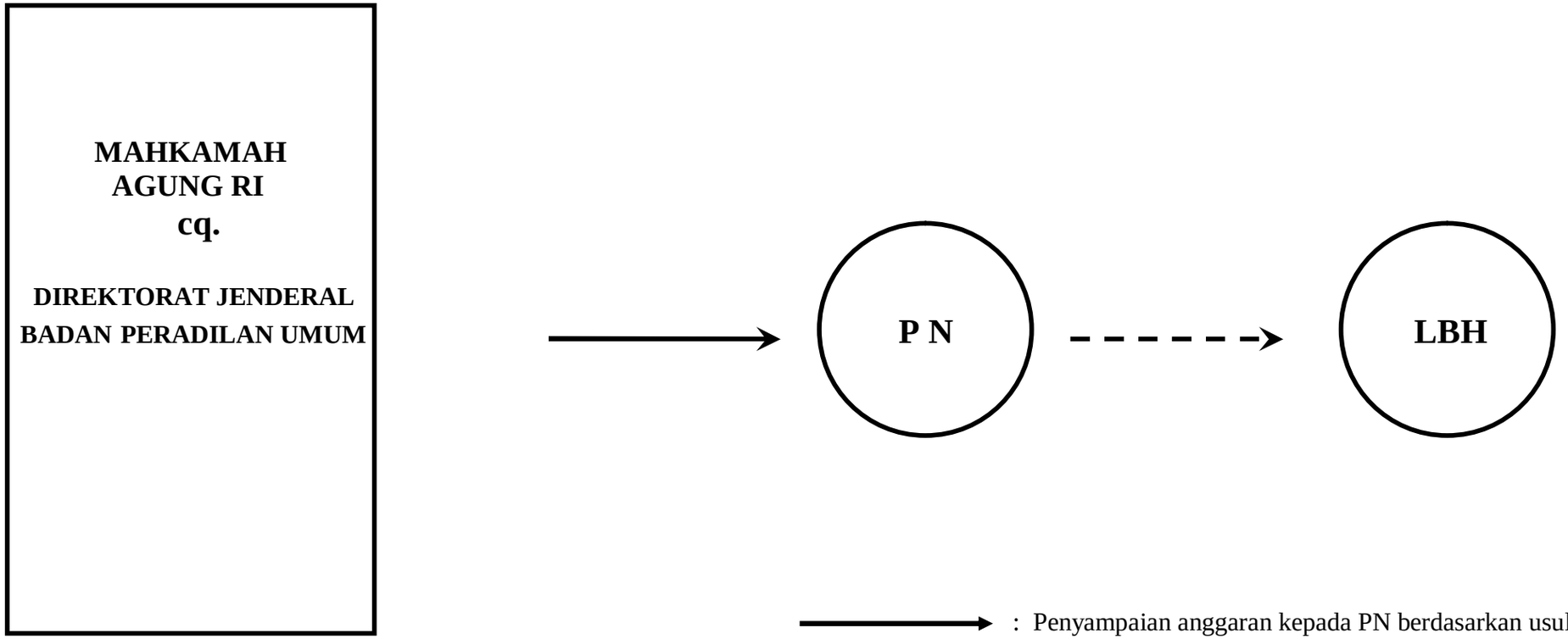

: Penyampaian anggaran kepada PN berdasarkan usulan LBH

: PN meneruskan dana bantuan hukum berdasarkan SPK
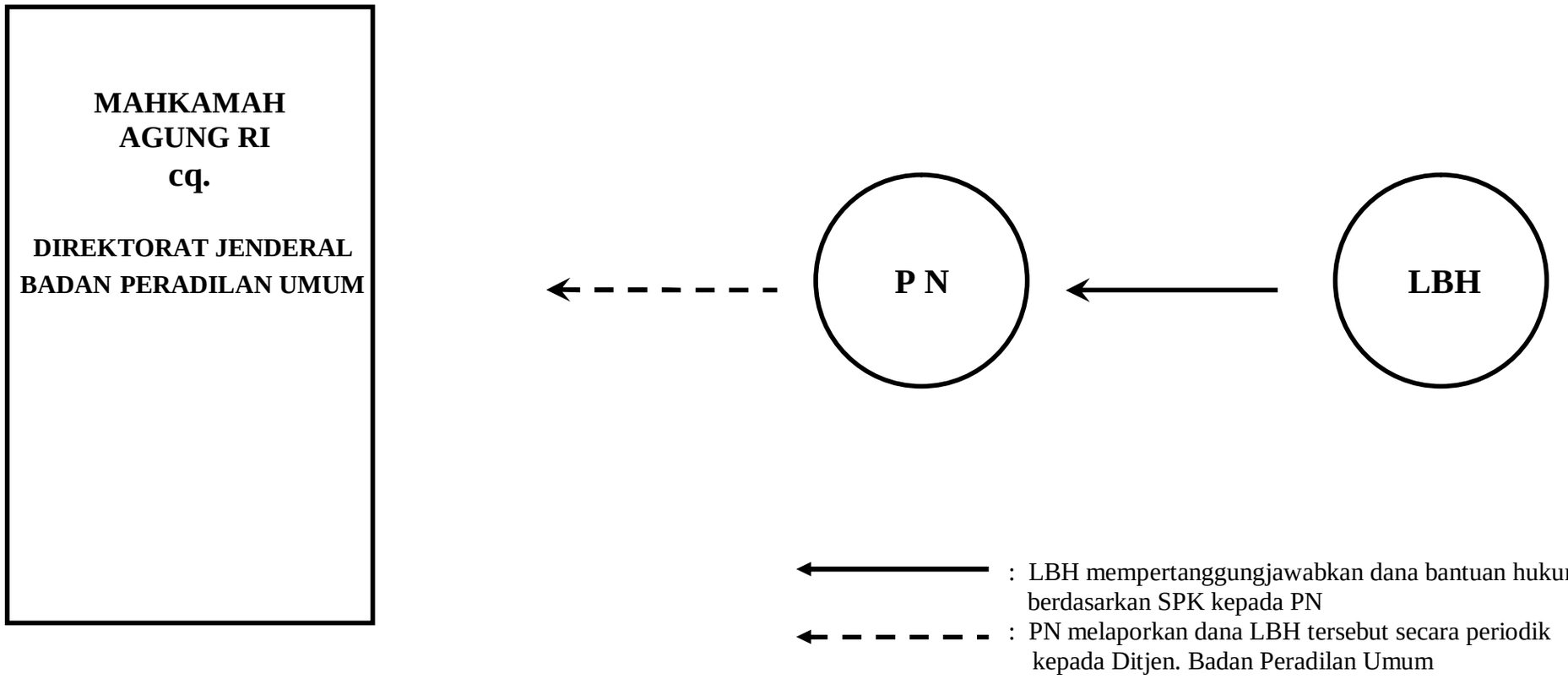
PROSEDUR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)